



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Palapa No. 6 Kode Pos : 85111 Kupang
Pos-El : inspektoratprovntt@gmail.com
Laman : www.inspektorat.nttprov.go.id

LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Inspektorat Daerah berfungsi sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah. Inspektorat Daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Seiring dengan berakhirnya pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023, Inspektorat Daerah Provinsi NTT menyusun Laporan Tahunan 2023 yang berisi rangkuman informasi atas gambaran pelaksanaan program dan kegiatan serta perkembangan dan hasil yang dicapai dalam satu tahun. Laporan tahunan diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pengawasan internal serta peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

B. Dasar

1. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 50/KEP/HK/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
2. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023 Nomor: DPPA/B.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 10 November 2023.

C. Tujuan dan Sasaran

1. Memberikan informasi tentang pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
2. Sebagai bahan informasi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam evaluasi dan pengambilan keputusan.

II. HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PENGAWASAN TA. 2023

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

A. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Pada Tahun 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan 3 (tiga) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPPA Tahun 2022. Rincian Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 dan persentase hasil pelaksanaan sebagai berikut :

Program/Kegiatan	Persentase (%)	Keterangan
I. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47,20%	--
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90,55%	--
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	64,58%	--
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	59,20%	--
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9,68%	--
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86,37%	--
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68,38%	--
II. Penyelenggaraan Pengawasan		
1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	58,77%	--
2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	53,17%	--

III. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		
1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	55,36%	--
2. Pendampingan dan Asistensi	77,09%	--

Rincian alokasi dan realisasi keuangan pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Dana DPPA	Pengeluaran	Sisa Dana	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	341.136.400,00	161.018.150,00	180.118.250,00	161.018.150,00
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.400.810.300,00	8.512.767.294,00	888.043.006,00	8.512.767.294,00
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	511.052.300,00	330.040.000,00	181.012.300,00	330.040.000,00
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.658.000,00	76.756.600,00	52.901.400,00	76.756.600,00
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	158.090.640,00	15.297.000,00	142.793.640,00	15.297.000,00
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	721.440.690,00	623.124.444,00	98.316.246,00	623.124.444,00
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.267.000,00	147.878.650,00	68.388.350,00	147.878.650,00
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan				
	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.737.659.900,00	1.609.040.053,00	1.128.619.847,00	1.609.040.053,00
	2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2.537.437.200,00	1.349.127.300,00	1.188.309.900,00	1.349.127.300,00
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi				
	1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.257.778.450,00	696.312.460,00	561.465.990,00	696.312.460,00
	2. Pendampingan dan Asistensi	643.767.700,00	496.270.200,00	147.497.500,00	496.270.200,00
Jumlah :		18.655.098.580,00	14.017.632.151,00	4.637.466.429,00	14.017.632.151,00

B. OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN SERTA SISA ANGGARAN

Berdasarkan PKPT dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan Program/Kegiatan dengan realisasi anggaran sampai tanggal 31 Desember 2023 sebesar 75,14% dengan rincian *output* kegiatan sebagai berikut :

a. *Output* Program/Kegiatan (lampiran 1)

b. Sisa Anggaran yang tidak digunakan :

Sisa anggaran DPPA Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sebesar Rp4.637.466.429,00 yang meliputi :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp1.611.573.192,00;

- 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar Rp2.316.929.747,00;
- 3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp708.963.490,00.

III. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

A. PERMASALAHAN

Terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023 antara lain:

1. Kurangnya evaluasi secara berkala;
2. Kurangnya aplikasi berbasis web seperti Sistem Informasi Manajemen (SIM-HP) dalam mendukung kelancaran aplikasi tindak lanjut hasil pengawasan berbasis sistem informasi;
3. Realokasi / *refocusing* anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
4. Keterbatasan pencairan dana GU pada Badan Keuangan Daerah sehingga tidak semua anggaran bisa dicairkan.

B. SOLUSI

Beberapa upaya dan kiat-kiat yang dilakukan antara lain:

1. Perlu adanya evaluasi secara berkala;
2. Perlu adanya penambahan aplikasi berbasis web seperti Sistem Informasi Manajemen (SIM-HP) dalam mendukung kelancaran aplikasi tindak lanjut hasil pengawasan berbasis sistem informasi.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disampaikan kepada Bapak Gubernur, atas perkenan disampaikan terima kasih.

Kupang, 29 Januari 2024

f Inspektur,


Stefanus F. Halla, S.T., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19730105 200012 1 004



Lampiran I (Output Program/Kegiatan) Inspektorat Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN							KETERANGAN	
		INPUT			OUTPUT					
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI		CAPAIAN
1	2	3	4	5	3	4	5	6	7	8
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		11.478.455.330	9.866.882.138	85,96%						
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	341.136.400	161.018.150	47,20%						
Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	127.595.000	40.437.900	31,69%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	12	240,00	
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	66.136.600	63.338.000	95,77%	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	3	300,00	
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	29.804.800	3.964.750	13,30%	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	3	300,00	
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.600.000	48.314.550	71,47%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	3	9	300,00	
Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	4.962.950	9,93%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tahun	1	1	100,00	
Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.400.810.300	8.512.767.294	90,55%						
Sub Kegiatan	Perangkat Daerah									
Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.213.531.000	8.339.516.869	90,51%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	14	100,00	
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	77.255.000	73.680.000	95,37%	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	14	14	100,00	
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	110.024.300	99.570.425	90,50%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	14	14	100,00	
Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Daerah	511.052.300	330.040.000	64,58%						
Sub Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	511.052.300	330.040.000	64,58%	Jumlah Pegawai fungsional umum dan fungsional tertentu yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Substantif dan Penjelangan)	orang	34	19	55,88	Keterbatasan dana karena pembatasan pengajuan nilai SPP SPM GU

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN							KETERANGAN	
		INPUT		URAIAN	OUTPUT		CAPAIAN			
		TARGET	REALISASI		SATUAN	TARGET		REALISASI		
		3	4		5	4		5		6
1	2	3	4	5	3	4	5	6	7	8
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	129.658.000	76.756.600	59,20%						
Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.631.100	92,62%	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	paket	12	12	100,00	
Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000	19.938.000	99,69%	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	bulan	12	12	100,00	
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.671.200	0	0,00%	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	0		
Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan/Material	35.000.000	10.088.450	28,82%	Tersedianya Bahan/Material/ Penggandaan Kantor	bulan	12	12	100,00	
Sub Kegiatan	Fasilitas Kunjungan Tamu	66.986.800	42.099.050	63,80%	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	bulan	12	12	100,00	
Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.090.640	15.297.000	9,68%						
Sub Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	158.090.640	15.297.000	9,68%	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	paket	1	1	100,00	
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	721.440.690	623.124.444	86,37%						
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.279.000	9.097.750	44,86%	Jumlah Surat yang dibuat dan dikirim	bulan	12	12	100,00	
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	299.998.830	236.088.998	78,70%	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	100,00	
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.001.300	4.440.600	73,99%	Tersedianya Perlengkapan Pantri	paket	12	10	83,33	Keterbatasan dana karena pembatasan pengajuan nilai SPP SPM GU
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	396.161.560	373.497.096	94,52%	Tersedianya Administrasi, Penatausahaan Keuangan, Terfaksananya Jasa dan Kebersihan Kantor, Tersaksananya Layanan Keamanan Kantor	bulan	12	12	100,00	
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.267.000	147.878.650	68,38%						
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	156.294.000	120.905.400	77,36%	Tersedianya jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Operasional Lapangan	bulan	12	12	100,00	
Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.977.900	3.780.000	18,92%	Terselenggaranya Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	12	100,00	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN							KETERANGAN	
		TARGET	INPUT		URAIAN	OUTPUT				
			REALISASI	CAPAIAN		SATUAN	TARGET	REALISASI		CAPAIAN
1	2	3	4	5	3	4	5	6	7	8
Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.995.100	23.193.250	57,99%	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	12	100,00	
Program Penyelenggaraan Pengawasan		5.275.097.100	2.956.167.353	56,08%						
Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.737.659.900	1.609.040.053	59,77%						
Sub Kegiatan	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.188.893.800	1.166.068.303	53,27%	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Pemeriksaan fisik, EPPD, Kinerja dan Kepatuhan Perangkat Daerah Provinsi NTT, Manajemen Sekolah, Pemeriksaan Proyek Strategis, Pemeriksaan Kinerja Kab/Kota, Audit BUMD, probity audit	laporan	208	151	72,60	Kegiatan Manajemen Sekolah Kabupaten dan Audit BUMD tidak dilaksanakan sedangkan Pemeriksaan Kinerja Kab/Kota digandeng dengan pengusutan AJU Kepala Daerah. Untuk 3 kegiatan ini terdapat alokasi anggaran tetapi tidak dapat direalisasikan karena Pembatasan pengajuan nilai SPP SPM GU
Sub Kegiatan	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3.200.000	1.800.000	56,25%	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	laporan	2	2	100,00	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Monev Dana Desa)					
Sub Kegiatan	Revisi Laporan Kinerja	261.732.600	250.130.500	95,57%	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja (Revisi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Revisi LPPD, Revisi Penyerapan Anggaran, Verifikasi output DAK)	laporan	14	27	192,86	
Sub Kegiatan	Revisi Laporan Keuangan	190.352.500	188.941.250	99,26%	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan Daerah, Revisi RKAP-PD	laporan	40	79	197,50	
Sub Kegiatan	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	93.481.000	2.100.000	2,25%	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (Monev RB, Penilaian PMPRB)	laporan	4	1	25,00	kegiatan Monev RB, Penilaian PMPRB terdapat alokasi anggaran tetapi tidak dapat dilaksanakan karena: 1. Adanya Perubahan regulasi penilaian RB dari Permenpan RB 25/2020 tentang Road Map RB 2020-2024 ke Permenpan 9 thn 2023 tentang Evaluasi RB menyebabkan adanya perubahan metode penilaian RB dan Tim Evaluasi. 2. Tim evaluasi internal (tdi opd dan pemprov NTT) belum disesuaikan dengan regulasi dan penilaian dilakukan oleh tim evaluator eksternal (tim pusat) 3. Penilaian RB dilakukan terhadap RB General dan Tematik (Regulasi lama penilaian terhadap 8 area perubahan dan dokumen pendukungnya)

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN							KETERANGAN	
		INPUT			OUTPUT					
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI		CAPAIAN
1	2	3	4	5	3	4	5	6	7	8
Kegiatan	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2.537.437.200	1.349.127.300	53,17%						
Sub Kegiatan	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	197.000.000	117.186.700	59,49%	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Monvrev TLHP	laporan	2	3	150,00	
Sub Kegiatan	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2.340.437.200	1.231.940.600	52,64%	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Revu DAU Specific Grand, Akhir Masa Jabatan, Pemeriksaan Khusus	laporan	42	66	157,14	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		1.901.546.150	1.192.582.660	62,72%						
Kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	1.257.778.450	696.312.460	55,56%						
Sub Kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	479.054.000	271.204.160	56,61%	Jumlah Laporan Koordinasi Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Supervisi, Koordinasi)	laporan	30	30	100,00	
Sub Kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	778.724.450	425.108.300	54,59%	Jumlah Laporan Asistansi dan Pendampingan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan (Pemuktahiran TLHP, Rakorwada, Buletin, Sertifikasi ISO, Publikasi Hasil Pengawasan, Evaluasi Responsif Gender, Monvrev ZI, Monrev LHKPN LHKASN, Kapabilitas APIP, Telaahan Sejawat)	laporan	8	8	100,00	Kegiatan Rakorwada tidak dilaksanakan, terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan ini tetapi tidak dapat direalisasikan karena Pembatasan pengajuan nilai SPP SPM GU
Kegiatan	Pendampingan dan Asistensi	643.767.700	496.270.200	77,09%						
Sub Kegiatan	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	143.650.000	118.450.000	82,49%	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Fasilitas Urusan Pemerintahan Daerah (Fasilitas Penutupan Buku, Penanganan Laporan Gratifikasi)	Perangkat Daerah	39	39	100,00	Tertaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Fasilitas) Penutupan Buku sebanyak 39 Laporan, Penanganan Gratifikasi sebanyak 1 Laporan) total 40 laporan
Sub Kegiatan	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	226.590.700	135.298.700	59,71%	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Sosialisasi Sabar Pungli, Anev Sabar Pungli, monitoring Mdp, Manajemen Risiko, Revu Manajemen ASN, Revu Pajak, Revu PBJ, Revu Fraud)	kegiatan	8	5	62,50	

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN							KETERANGAN	
		INPUT			OUTPUT					
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI		CAPAIAN
1	2	3	4	5	3	4	5	6	7	8
Sub Kegiatan	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Integrasi	273.527.000	242.461.500	88,65%	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peningkatan Integrasi	Perangkat Daerah	39	39	100,00	
					Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Berturan Kepeningkatan, Penilaian ZI	laporan	2	2	100,00	
					Terlaksananya Quality Assurance SPIP Terintegrasi	laporan	3	3	100,00	
	Jumlah	18.655.098.530	14.017.632.151							

Kupang, 29 Januari 2024

Inspektur

Stefanus F. Halla, S.T., M.M

Stefanus F. Halla, S.T., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19730105 200012 1 004

